



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

---

# **Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI**

**KLIPING  
BERITA MEDIA CETAK  
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

---

**HARI SENIN, 11 FEBRUARI 2013**



DAFTAR ISI

Trans Sumatera Highway .....	1
Klasifikasi Pelabuhan .....	2
Pembangunan Smelter .....	3
Ekonomi .....	4
Pengadaan Lahan Infrastruktur .....	5
Proyek Infrastruktur .....	6



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☒ Feb

☐ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☐ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☒ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Pembangunan tOL Indralaya-Palembang Minta Dipercepat	<div>- Pembangunan jalan tol Indralaya – Palembang ini merupakan bagian dari Trans Sumatera Highway (TSH) yang membentang dari Provinsi Lampung hingga Aceh dengan panjang 1.980 km</div> <div>- TSH akan dilanjutkan dengan pembangunan enam pelabuhan laut internasional dan lima bandara internasional di Sumatera. Nanti nya tulang punggung ekonomi Indonesia akan berada di Sumatera</div>			Rp. 7 triliun	PT. Utama Karya	

Pembangunan Tol Indralaya-Palembang Minta Dipercepat

Alex Noerdin: Sumsel Lebih Dulu Launching TSH

INDRALAYA - Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin meminta supaya pembangunan jalan tol sepanjang 22 Km dari Indralaya-Palembang dipercepat dari target semula. "Target dari pihak PT Utama Karya memang 18 bulan dimulai dari sekarang (Kamis, 7/2) lalu, tapi saya minta kepada Direktur Utama Utama Karya L. Sutanto untuk diusahakan selesai dalam waktu 14 bulan," ujar Alex saat pemasangan tiang pancang pembangunan jalan tol Indralaya-Palembang di dalam kompleks kampus Universitas Sriwijaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis, (7/2).

Pembangunan jalan tol Indralaya - Palembang ini merupakan bagian dari Trans Sumatera Highway (TSH) yang membentang dari Provinsi Lampung hingga Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan total panjang 1.980 Km. "Selain menggerakkan roda perekonomian, melalui pembangunan tol ini juga diharapkan akan mengurangi kemacetan yang kini melanda ruas jalan Palembang-Indralaya," ujar Alex.

Selain itu, pembangunan jalan tol ini merupakan pembuktian kepada seluruh provinsi di Pulau Sumatra khususnya, bahwa niat untuk membangun Trans Sumatera Highway bukanlah niat main-main. Hal ini diwujudkan dengan mulai dibangunnya jalan tol Indralaya-Palembang. "Sebagai Ketua Gubernur se-Sumatera, saya menginisiasi pembangunan Trans Sumatera Highway. Sebanyak 10 gubernur berlomba-lomba untuk menjadi provinsi pertama yang membangun jalan tol. Tapi ternyata Provinsi Sumsel lebih dahulu me-launching pembangunannya," ujar Alex.

Trans Sumatera Highway akan dilanjutkan dengan pembangunan enam pelabuhan laut internasional dan lima bandara internasional di Sumatera. Nantinya tulang punggung ekonomi Indonesia akan berada di Sumatera. Provinsi Sumsel juga akan menjadi bagian tersebut. "Saat ini, kita masih di urutan ke sembilan provinsi terkaya di Indonesia. Namun tiga tahun lagi, saya yakin Provinsi Sumsel akan menjadi provinsi ketiga terkaya di Indonesia," tegas Alex.

Di samping pembangunan jalan tol Indralaya-Palembang, lanjut dia, Provinsi Sumsel dalam waktu dekat akan membangun monorel, jalan tol Kayu Agung-Palembang, jembatan Musi II, Musi III, dan duplikasi jembatan Ampera. "Selain itu, kita juga akan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Api-Api (TAA), pelabuhan laut internasional TAA. Dengan demikian, perekonomian di Provinsi Sumsel akan semakin meningkat," jelas Alex.

Untuk proses pembebasan lahan, kata Alex, total lahan yang akan diganti rugi seluas 302 hektare (ha). Rinciannya, 176 ha untuk poros utama dan 126 ha untuk empat exit interchange. "Kita sudah menyiapkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk ganti rugi lahan dari APBD. Untuk mempercepat proses itu, kita akan minta bantuan dana tanah yang akan diganti rugi kepada Pemkab Ogan Ilir," jelas Alex.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Utama Karya L. Sutanto berjanji pihaknya akan merealisasikan permintaan Gubernur Sumsel dalam penyelesaian pembangunan jalan tol dalam tempo 14 bulan. Namun



Sebagai Ketua Gubernur se-Sumatera, saya menginisiasi pembangunan Trans Sumatera Highway (TSH)"  
H Alex Noerdin  
Gubernur Sumatera Selatan

pihaknya juga mengingatkan pembangunan ini hanya bisa dipercepat jika pembebasan lahan sudah selesai 100 persen. "Pembangunan dalam waktu 14 bulan itu memang kiranya. Ini kalau lahan semua sudah dibebaskan, maka pengerjaannya akan dilakukan dalam waktu dekat," tandasnya.

Untuk biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan tol itu, Sutanto menerangkan, pihaknya menanamkan investasi sekitar Rp 40 miliar per kilometer. Namun jumlah tersebut belum ditambah dengan biaya pembangunan beberapa jembatan. "Total dana yang dibutuhkan itu sekitar Rp 7 triliun" pungkasnya.

Terkait dengan tarif jalan tol, Sutanto menjelaskan, saat ini pihaknya belum memutuskan berapa besaran biaya yang akan dibebankan kepada masyarakat yang melintas di jalur tol ini. Namun dia meyakini gubernur akan mempertimbangkannya secara matang, sehingga menguntungkan bagi semua pihak. (tjm)



SEREMONI: Gubernur Sumsel H Alex Noerdin (kedua dari kiri) didampingi Bupati Ogan Ilir Mawardi Yelha dan Wakil Ketua DPRD Sumsel M. Jauhari melakukan pemancangan tiang pertama pembangunan jalan tol Indralaya - Palembang di Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis, (7/2).





Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☒ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Pelindo Lakukan Klasifikasi Pelabuhan	- Dirut PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Harry Sutanto akan mengembangkan konsep pelabuhan khusus, artinya setiap pelabuhan yang ada dibawah kendali Pelindo IV akan dibagi klasifikasinya, sehingga fungsi satu pelabuhan berbeda dengan pelabuhan lainnya.			Rp.774 miliar		

Pelindo Lakukan Klasifikasi Pelabuhan

JAKARTA—Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Harry Sutanto akan mengembangkan konsep pelabuhan khusus. Artinya, setiap pelabuhan yang ada di bawah kendali Pelindo IV akan dibagi klasifikasinya. Sehingga fungsi satu pelabuhan berbeda dengan pelabuhan lainnya.

"Intinya, kami ingin membagi klasifikasi pelabuhan agar tidak tercampur satu dengan lainnya," kata Harry dalam keterangannya, kemarin (10/2). Tetapi, katanya, untuk menerapkan konsep ini hingga optimal dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tahun ini, Pelindo IV telah menyiapkan investasi sebesar Rp 774 miliar untuk mendukung penerapan konsep tersebut.

Harry menjelaskan, konsep pelabuhan khusus dimulai dengan diresmikannya Pelindo IV Cabang Paotere yang akan khusus menangani bongkar muat kapal kargo skala di bawah 5.000 ton. Nantinya kapal-kapal kargo skala 5.000 ton kebawah yang ada di Dermaga Peti Kemas Soekarno-Hatta Makassar akan dibongkar di Pelabuhan Paotere.

"Proses bongkar muat tersebut akan dilakukan setelah dermaga di Pelabuhan Paotere diperbaiki," katanya. Selain memindahkan sebagai aktivitas bongkar muat di Dermaga Soekarno-Hatta ke Pelabuhan Paotere, pihaknya juga akan mengoptimalkan Pelabuhan Garongpong di Barru untuk bongkar muat barang yang bisa mengganggu produk lainnya, seperti semen, material bangunan dan pupuk.

Begitu pula dengan pelabuhan penumpang akan dipindahkan ke Takalar, sehingga seluruh aktivitas di Makassar akan fokus pada bongkar muat peti kemas. "Khusus untuk perbaikan Pelabuhan Paotere, kami telah menyiapkan alokasi khusus. Hal utama



KHUSUS: Salah satu aktivitas yang dilakukan di PT Pelindo beberapa waktu lalu. Kini, PT Pelindo IV akan mengembangkan konsep pelabuhan khusus. Perseroan akan melakukan klasifikasi.

yang harus segera dikerjakan di Pelabuhan Paotere adalah memperbaiki dermaga 10 yang telah rapuh," kata Harry.

Selama ini Pelabuhan Paotere beroperasi di bawah kendali Pelindo IV Cabang Makassar. Statusnya juga hanya sebagai pelabuhan kawasan. Dengan diresmikannya Pelindo IV Cabang Paotere ini, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan menata kegiatan bongkar muat di pelabuhan rakyat tersebut.

Dia menjelaskan, dari tahun ke tahun kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan Paotere makin meningkat. Selain itu, pelabuhan ini juga ramai dikunjungi masyarakat lokal serta turis manca negara. Ramainya kunjungan ini karena keunikan pelabuhan Paotere yang merupakan pelabuhan tradisional dan lokasinya sangat dekat dengan pelabuhan Makassar.

Pelabuhan Paotere sendiri memiliki 11 dermaga dengan panjang yang bervariasi dari 33 meter hingga 100 meter. Enam dermaga di sisi timur dan lima dermaga di sisi barat dengan luas lahan kurang lebih 15,3 hektare. (dri)



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☒ Feb

☐ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☐ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☒ Kontan

☐ Lain-lain,

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Weda Bay bangun Smelter Nikel dalam Dua Tahap	<div>- Pembangunan Smelter ini akan dilakukan dalam dua tahap</div> <div>- Untuk pembangunan smelter tahap pertama ini akan memakan waktu selama satu tahun</div> <div>- Pembangunan tahap kedua ditargetkan mampu selesai pada 2018 mendatang. Jika pembangunan smelter tahap kedua sudah selesai, maka kapasitas produksi Weda bay akan bertambah menjadi 65.000 ton per tahun untuk nikel dan cobalt sebanyak 3.000 ton per tahun</div>	2013	2014 2018		PT. Weda Bay Nickel	

Weda Bay Bangun Smelter Nikel dalam Dua Tahap

Investasi pembangunan *smelter* Weda Bay akan menelan biaya US\$ 5,5 miliar

Tendi Mahadi, Azis Husaini

JAKARTA. Perusahaan tambang dan logam asal Perancis, Eramet SA akan mulai merealisasikan proyek pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (*smelter*) *cobalt* dan *nickel* pada pertengahan tahun ini. Pembangunan itu dilakukan anak usaha Eramet di Indonesia yakni PT Weda Bay Nickel (WBN), pembangunan *smelter* ini akan dilakukan dalam dua tahap.

Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengungkapkan, rencana pembangunan *smelter* Weda Bay pada tahap pertama akan dilakukan pada awal semester kedua tahun ini. "Lokasinya di Halmahera mulai dibangun pertengahan tahun ini," ungkap Panggah, akhir pekan lalu.

Menurutnya, pada tahap pertama ini Weda Bay akan mengucurkan investasi sebesar US\$ 3,3 miliar. Sementara itu, untuk pembangunan *smelter* tahap pertama ini akan memakan waktu selama satu tahun, sehingga Weda Bay menargetkan bisa mulai berproduksi pada pertengahan tahun 2014 mendatang.

Menurutnya, dari proyek

tahap pertama tersebut, Weda Bay akan memiliki kapasitas produksi nikel hingga 35.000 ton nikel per tahun dan *cobalt* sebesar 1.300 ton per tahun. Pembangunan tahap pertama ini juga akan menyerap 3.500 orang tenaga kerja.

Panggah melanjutkan, setelah tahap pertama selesai tahun 2014 nanti, Weda Bay akan melanjutkan pembangunan tahap kedua dengan investasi mencapai US\$ 2,2 miliar. "Sehingga total investasinya mencapai US\$ 5,5 miliar," ungkap dia.

Menurutnya, pembangunan tahap kedua tersebut ditargetkan mampu selesai pada 2018 mendatang. Jika pembangunan *smelter* tahap kedua sudah selesai, maka kapasitas produksi Weda Bay akan bertambah menjadi 65.000 ton per tahun untuk nikel dan *cobalt* sebanyak 3.000 ton per tahun.

Panggah menambahkan produk proyek hilirisasi *cobalt* dan nikel yang dilakukan oleh Weda Bay akan dialokasikan untuk industri logam di dalam negeri. "Nanti akan dipasok ke perusahaan baja untuk produk *carbon steel* dan *stainless steel*," lanjutnya.

Menurutnya, sudah ada per-

temuan Pemerintah dengan Presiden Direktur Weda Bay, Alain Giraud yang membahas beberapa hal seperti potensi insentif yang bisa mereka dapatkan. Salah satunya Weda Bay menurut Panggah kemungkinan akan memperoleh *tax holiday*.

Selain itu, dia menjelaskan, pihak Weda Bay juga mengutarakan komitmennya untuk menggunakan bahan baku lokal untuk proses konstruksi pembangunan pabrik *smelter* tersebut. Bahkan kontraktor lokal pun siap diajak untuk bekerja sama.

Selain weda Bay, Panggah menjelaskan, beberapa perusahaan lain juga berpotensi

untuk memulai proyek pembangunan *smelter* pada tahun ini adalah Dubai Aluminium yang ingin membangun *smelter* aluminium di Indonesia.

Ada juga perusahaan pengolahan bijih besi Indoferro di Banten yang kini juga telah membangun *smelter* untuk mengolah *iron ore* untuk keperluan bahan baku baja. Sementara itu, PT Meratus Jaya Iron and Steel sudah menyelesaikan pembangunan tahap pertama untuk produksi *sp onge iron* sejak akhir 2012.

Ladjiman Damanik, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) mengatakan, sebaiknya pemerintah memiliki

pemetaan yang jelas jika ingin program hilirisasi mineral berhasil.

"Kalau mau, jangan minta seluruh pengusaha mineral bikin *smelter*, bikin saja satu atau beri penugasan satu perusahaan untuk membangun, nanti yang lainnya itu menyusul," ungkap dia.

Menurutnya, kegagalan dalam hilirisasi mineral lantaran tidak ada pasokan. Sementara di daerah penghasil tidak ada infrastruktur listrik yang besar untuk menggerakkan pabrik *smelter*. "Memang serba salah sebaiknya *smelter* dekat dengan daerah penghasil, tapi tidak ada listriknya, akhirnya bikin di Jawa," kata dia.

Menurut Dede, pemerintah juga sudah melakukan koordinasi dengan dua asosiasi yaitu, Asosiasi Nikel Indonesia (ANI) dan juga Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo). "Kami akan awasi ketat, jangan sampai ini hanya akal-akalan mereka agar dapat izin ekspor," tegasnya.

Ratusan Proposal Pembangunan Smelter

PEMERINTAH mengaku telah menerima 180 proposal pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau *smelter* hingga Desember tahun lalu. Dari jumlah itu, 149 merupakan proposal pembangunan *smelter* logam.

Direktur Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dede I Suhendar

mengatakan, untuk mengawasi proses pembangunan *smelter* itu pemerintah telah membentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari sejumlah lembaga terkait, yaitu Litbang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perdagangan serta sejumlah analis per-

tambahan dari beberapa universitas.

Menurut Dede, pemerintah juga sudah melakukan koordinasi dengan dua asosiasi yaitu, Asosiasi Nikel Indonesia (ANI) dan juga Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo). "Kami akan awasi ketat, jangan sampai ini hanya akal-akalan mereka agar dapat izin ekspor," tegasnya.





Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas  
☐ Republika  
☐ Rakyat Merdeka  
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia  
☐ Sinar Harapan  
☐ Seputar Indonesia  
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo  
☐ Suara Pembaruan  
☐ Investor Daily  
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia  
☐ Pikiran Rakyat  
☒ Kontan  
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,  
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Penambahan Pasokan gas di Daerah Belum Merata	<div>- Gara-gara suplai gas tak merata, ada industri yang kelebihan pasokan gas, disini lain industri di daerah lain kekurangan gas, sebagai contoh, gas bagi industri di Jawa Timur melimpah, sementara industri di Jawa Barat dan Banten Kekurangan Gas</div> <div>- PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) sudah berkomitmen menambah pasokan gas seperti wilayah Banten. Penambahan ini akan mulai dilakukan pada Juni mendatang</div>					

Penambahan Pasokan Gas di Daerah Belum Merata

Pasokan gas untuk industri di wilayah Banten dan Jawa Barat akan ditambah

Tendi Mahadi

JAKARTA. Pelaku industri di Jawa Timur bisa bernapas lega setelah pasokan gas untuk industri di kawasan ini ditambah tahun lalu. Sementara untuk pasokan gas di Banten dan Jawa Barat juga akan segera dipenuhi secepatnya sehingga industri tidak lagi kekurangan pasokan gas.

Almad Saifun, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) mengatakan, saat ini pasokan gas di Jawa Timur bertambah 20 million metric standard cubic feet per day (mmscfd) menjadi 330 mmscfd. Padahal, kebutuhan gas industri di Jawa Timur sekitar 328 mmscfd.

Alhasil, industri di Jawa Timur berkelimpahan gas. "Industri di Jawa Timur bisa produksi maksimal dengan tambahan pasokan ini," kata dia, akhir pekan lalu.

Elisa Siringa, Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), yakin, industri keramik dalam negeri lebih mudah menaikkan produksi jika pasokan gas terpenuhi. Tahun lalu, proyeksi realisasi produksi keramik di dalam negeri mencapai 330 juta meter persegi. Dengan tambahan pasokan gas di Jawa Timur, produksi keramik di tahun ini diproyeksi tumbuh 15% menjadi 380 juta meter persegi.

Saat ini, menurut Elisa, terdapat sekitar 10 produsen keramik di Jawa Timur. Mereka

bisa menaikkan utilisasi produksi dari sebelumnya hanya mencapai 70%. "Peningkatan utilisasi produksi, terutama industri keramik Jawa Timur, bisa mendorong peningkatan produksi secara nasional," ujar Elisa.

Lagi pula, pemenuhan kebutuhan gas di dalam negeri lebih membawa manfaat ekonomi lebih optimal ketimbang pendapatan dari ekspor gas ke luar negeri. Sayangnya, pemerintah terkesan pragmatis sehingga lebih banyak menjual gas ke luar negeri ketimbang

Pemenuhan kebutuhan gas di dalam negeri lebih bermanfaat ketimbang hasil dari ekspor gas.

memprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri.

Ironisnya, gara-gara suplai tak merata, ada industri yang kelebihan pasokan gas, di sisi lain industri di daerah lain kekurangan gas. Sebagai contoh, gas bagi industri di Jawa Timur berlimpah, sementara industri di Jawa Barat dan Banten kekurangan gas.

Suplai tidak merata

Penambahan pasokan gas yang belum merata ke seluruh daerah membuat Saifun kece-



KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Kebutuhan gas akan semakin meningkat seiring rencana pengembangan industri ke depan.

wa. Untuk itu, ia akan mendesak pemerintah untuk melakukan proyek penyambungan pipa gas trans Jawa dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Dengan begitu akan terjadi keseimbangan pasokan gas. "Dari Cirebon menyambung ke Semarang, dan menyambung lagi ke Gresik," paparnya.

Menurutnya, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sudah berkomitmen menambah pasokan gas seperti untuk wilayah Banten. Penambahan pasokan gas ini menurutnya akan mulai dilakukan pada

Juni mendatang.

Ia mengatakan, tambahan pasokan gas yang akan dialokasikan untuk wilayah Banten mencapai 50 mmscfd dari pasokan saat ini sekitar 160 mmscfd. "Gas itu akan disuplai ke wilayah Banten Barat dan Cilegon," kata Saifun. Selain Banten, penambahan pasokan gas juga direncanakan untuk wilayah Jawa Barat. Total kebutuhan gas untuk industri di Jawa Barat sekitar 400 mmscfd, dan baru terpenuhi 60%.

Meski belum ada data res-

mi, tambahan gas di wilayah ini direncanakan dimulai pada Oktober 2013. "Saat ini masih dalam proses penyambungan pipa gas," kata Saifun.

Sebelumnya Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan, tahun ini kebutuhan gas industri mencapai 2.181,64 mmscfd. Kebutuhan untuk bahan baku 1.108 mmscfd dan untuk energi sebesar 1.073,64 mmscfd. Kebutuhan gas tersebut diyakini akan semakin meningkat seiring dengan rencana pengembangan industri ke depan.



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

## Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☒ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Aturan Pembebasan Lahan Masih Terganjil di Tiga Instansi	<div>- Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Tapi aturan ini belum cukup untuk mengatasi hambatan pengadaan lahan dalam pembangunan onfrastruktur di Indonesia</div> <div>- Selama ini, hambatan pembebasan lahan menjadi keluhan utama investor yang menggarap infrastruktur</div>					

### ■ PENGADAAN LAHAN INFRASTRUKTUR

## Aturan Pembebasan Lahan Masih Terganjil di Tiga Instansi

JAKARTA. Proses pengadaan lahan untuk proyek pemerintah tetap tersendat meskipun presiden dan DPR sudah menyelesaikan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum. Setelah ditelisik, ternyata para pembantu presiden yakni Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional belum menyelesaikan tugas dengan membuat aturan pelaksana.

Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sejak 7 Agustus yang lalu. Tapi, aturan ini belum cukup untuk mengatasi hambatan pengadaan lahan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sebab, Perpres tersebut baru bermanfaat untuk percepatan pembebasan lahan, sementara untuk biaya pembebasan tanah, penetapan lokasi lahan, serta teknis pembebasan lahan belum diatur.

Sekadar Anda tahu, biaya pembebasan lahan ini harus menunggu aturan Menteri Keuangan sedangkan penetapan lokasi lahan menunggu aturan menteri Dalam Negeri, dan aturan teknis mengenai pembebasan lahan menjadi

tanahan Nasional (BPN).

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan, saat ini, Kementerian Dalam Negeri masih merumuskan berbagai instrumen yang akan masuk dalam aturan. "Peraturan Menteri Dalam Negeri masih kami proses, kita tunggu saja," katanya.

Sementara, Kepala BPN Hendarman Supandji, mengklaim bahwa saat ini di instansinya sudah tidak ada masalah lagi untuk memproses pengadaan lahan. Ia menyatakan telah menyelesaikan petunjuk

**BPN sudah menyelesaikan aturan teknis pengadaan lahan untuk umum.**

teknis yang diperlukan untuk pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan tempat umum.

Dedy S. Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, peraturan menteri keuangan akan diperlukan untuk mengatur biaya operasional dan pendukung pembebasan tanah yang pembiaya-

negara (APBN).

Sejatinya, tiga instansi ini telah diberikan waktu oleh Presiden untuk menyelesaikan aturan teknis selama tiga bulan setelah Perpres diteken. Artinya, aturan ini seharusnya sudah selesai di akhir November 2012. Lantaran para pembantu presiden bekerja dengan lambat, proses pengadaan lahan bagi proyek infrastruktur yang digagas pemerintah pun masih terus tertatung-katung.

Sebagai catatan saja, selama ini, pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk kepentingan umum di Indonesia memang banyak yang terkendala oleh pengadaan lahan.

Salah satu contoh kasusnya pernah disampaikan oleh Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum beberapa waktu yang lalu. Misalnya, peliknya pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan Ruas Jalan Tol Semarang - Batang- Cirebon. Atas kerumitan yang terjadi tersebut, Djoko bahkan tidak yakin bahwa pembangunan ruas tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan target pemerintah pada tahun 2014 nanti. Selama ini, hambatan pembebasan lahan menjadi keluhan utama investor yang menggarap infrastruktur.





Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

## Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☒ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Revisi Aturan Jalan Tol Siap Terbit	- Dalam waktu dekat, pemerintah segera menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2005 tentang Jalan Tol. Salah satu poin penting dalam perubahan beleid ini adalah pembentukan BUMN yang bergerak di bidang jalan tol selain PT. Jasa Marga, Tbk					

### ■ PROYEK INFRASTRUKTUR

## Revisi Aturan Jalan Tol Siap Terbit

JAKARTA. Dalam waktu dekat, pemerintah segera menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 15/ 2005 tentang Jalan Tol. Salah satu poin penting dalam perubahan beleid ini adalah pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jalan tol selain PT Jasa Marga Tbk.

Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum bilang, dengan perubahan PP ini, pemerintah bisa mengerjakan proyek jalan tol yang secara ekonomi layak namun secara finansial tidak. "PP ini sudah hampir final, sekarang sudah ada di Sekretaris Kabinet (Setkab), tinggal diundang sekali lagi oleh Setkab, sebelum diparaf Presiden," ujarnya, akhir pekan lalu.

Setelah perubahan PP itu diteken, Djoko bilang, pemerintah juga akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus yang menunjuk dan mengatur satu BUMN khusus jalan tol. Jadi, di satu sisi, PP ini diperbaiki, di sisi lain konsep penunjukan BUMN jalan tol juga berjalan. "Sejauh ini, BUMN yang diusulkan adalah PT Hutama Karya (HK)," tuturnya.

Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Ari Widiyantoro, menyatakan perusahaannya siap menjalankan mandat sebagai BUMN jalan tol. Hutama Karya sudah mengubah Anggaran Dasar untuk menunjang bisnis jalan tol. "Kami sudah membentuk tim pengelola jalan tol dan menambah direktorat baru, yakni direktorat

pengembangan yang akan membawahi pengembangan jalan tol," jelas Ari kepada KONTAN, Minggu (10/2).

Sebagai BUMN, menurut Ari, Hutama Karya memiliki kapasitas mengemban tugas dari pemerintah tersebut. Salah yang telah dilakukan adalah membuat kajian dan uji kelayakan tentang jalan tol.

Tapi, sebelum menjadi BUMN jalan tol, Ari bilang, Hutama Karya masih menunggu tiga instrumen hukum, yakni perubahan PP 15/ 2005, serta dua Perpres soal tentang penunjukan dan Penambahan Modal Negara (PMN).

Sekadar informasi, sebelumnya, Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengusulkan Hutama Karya bertransformasi dari perusahaan jasa konstruksi menjadi perusahaan jalan tol.

Langkah ini menjadi solusi untuk mendorong keterlibatan pemerintah menggarap jalan tol. Maklum, selama ini, proyek jalan tol selalu dikelola perusahaan yang khusus menangani jalan tol, dan porsi saham pemerintah terbatas. Misalnya, PT Jasa Marga dan PT Adhi Karya. Karena status ini, pemerintah tidak bisa memaksakan setiap proyek pembangunan jalan tol bisa digarap dua perusahaan itu lantaran selalu ada hitungan bisnis.

Padahal, pemerintah ingin membangun banyak jalan tol untuk pembangunan wilayah, meskipun secara bisnis tidak menguntungkan.

Fahriyadi